

**Menafsir Ahok dari Perspektif Etika Utilitarianisme  
(Analisis Hermeneutik pada Komunikasi & Tindakan Politik)**

**Fabianus Fensi**

*fabianusfensi@gmail.com*

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia

**ABSTRACT**

*Ahok is the Governor of Jakarta Province that has a style of communication and political action is unique. Communication styles and how to act frankly often rated as a bad action. This study tried to see the other side, namely the use of Ahok's communication style and political action lead Jakarta. By using the utilitarian ethical theory perspective this study tried to explore the meaning of style led Ahok with instrument hermeneutical interpretation, even archaeological. Starting from this perspective and approach, then discovered that Ahok has a specific purpose with his unique style. Communicate, act, and at the top of the corridor applicable rules Ahok makes a breakthrough on behalf of and for the benefit of a lot of peoples of Jakarta Province. The principle of utilitarianism acts and regulations were given a room in Ahok's communications and political action. Or, utilitarianism demanding that always strives for happiness as much as possible for as many people got confirmation in Ahok's action. Low context model communication and political action is the antithesis of Ahok's disgust to the social system that is permissive to the behavior of the political elite who often manipulate people. On behalf of his rebellion against the hypocrisy of the elite, Ahok goes to ask everything clearly and seemed arrogant. Behind it all, it must be admitted, the ordinary people become the main Ahok's consideration.*

*Key Words: Utilitarianism, Hermeneutics, High Context, Low Context*

**PENDAHULUAN**

Jagat perpolitikan DKI Jakarta memanas. Tampilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke panggung penuh idealisme, yaitu perubahan wajah Ibu Kota negara turut mewarnai iklim pembahasan mengenai pentingnya komunikasi, baik pada

tingkat masyarakat, elit politik partai, juga para cerdik cendekiawan di negeri ini. Gaya bicara yang blak-blakan, terus terang, dan terkesan seperti "marah-marah", serta tidak memperhitungkan etika komunikasi adalah sebagian dari kesan publik

terhadap gaya komunikasi Gubernur DKI Jakarta ini.

Dari heboh “perkelahian” dengan DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) siluman, penggunaan kata “*tai*” dalam wawancara *live* televisi, kata “bajingan”, “bego” untuk para bawahannya sampai kepada kebijakan transparansi anggaran, pelarangan penyembelihan hewan kurban di sembarang tempat, dan tindakan penggusuran warga yang menempati bantaran kali, seperti Kampung Pulo, Kali Jodoh, Pasar Ikan, Luar Batang, dan lain-lain adalah sebagian dari sekian banyak contoh bagaimana cara berkomunikasi dan tindakan politik Ahok disoroti dari mana-mana. Media massa memiliki kewajiban normatif untuk menyampaikan fakta peristiwa “Ahok” ini apa adanya.

Arus komunikasi Ahok yang serba telanjang ini seakan mengajak orang-orang di sekitarnya, terutama para anggota DPRD ikut terjebur, maka terjadilah komunikasi saling marah, kalau tidak mau disebut saling umpat. Masyarakat memiliki penilaian sendiri terhadap fenomena kepemimpinan yang jarang ditemukan sebelumnya.

Semua kebijakan yang tidak pro rakyat, korupsi yang menjalar di mana-mana, dan kolusi yang mengakar kuat dalam sistem birokrasi pemerintahan sehingga irama perjalanan birokrasi menjadi tertutup, dibabat habis dengan pola komunikasi gaya koboi versi Ahok. Reaksi pun bermunculan.

Misalnya, bagi peneliti komunikasi politik Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Nur, komunikasi politik yang ditonjolkan oleh Ahok tidak ideal dengan masyarakat demokrasi.<sup>1</sup>

“Di negara-negara demokrasi gaya Ahok ini agak jarang, malah ditemukan di negara yang tidak *establish* demokrasinya. Gaya komunikasi politik pada negara-negara yang tidak menerapkan asas demokrasi biasanya terlihat meledak-ledak dan semaunya sehingga yang terlihat dalam gaya komunikasi politik tidak sesuai dengan *attitude* politik”, kata Firman Nur.<sup>2</sup>

Lain lagi, pendapat pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali Effendi. Dia membuat tiga karakteristik<sup>3</sup> dalam gaya komunikasi politik Ahok, yaitu: *pertama*, gaya komunikasi yang menuntut pembuktian terbalik. Dengan gaya ini Ahok menegaskan pentingnya integritas, dan kejujuran untuk menyudutkan lawan bicaranya. “*Kalau membahas soal korupsi misalnya, Ahok selalu mengatakan kalau tidak korupsi, tunjukkan dong dari mana penghasilan, apakah sudah bayar pajak dan sebagainya,*” tutur Effendi.

Dengan gaya komunikasi ini Ahok dinilai publik sebagai pejabat yang bersih, tidak korupsi, transparan, dan berintegritas. Apa

<sup>1</sup>*Kompas.com*, Minggu, 15 Maret 2015 | 12:25 WIB, diakses tanggal 28 September 2015.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>CNN Indonesia, Senin, 01/06/2015, 15:00 WIB.

yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukannya. *Kedua*, Ahok merasa, untuk urusan Jakarta, dirinya adalah yang paling tahu. Sebagai gubernur, tidak ada orang Jakarta yang lebih tahu apa persoalan Jakarta dan apa solusinya. Kondisi ini membuat Ahok sulit untuk mendengarkan pendapat atau masukan orang lain.

*Ketiga*, gabungan dari dua gaya sebelumnya. Ahok cenderung untuk melontarkan pernyataan secara terang-terangan, dan cenderung frontal. Ahok terkesan meremehkan atau merendahkan yang lainnya. Seperti ketika ia menyampaikan perkataan yang tidak pantas dalam sebuah acara televisi yang disiarkan secara langsung.

Menurut Effendi, setiap orang, terutama pemimpin, harus tahu mana yang bisa disampaikan di publik dan mana yang harus disampaikan dalam ruangan. Kasus teguran Ahok secara terbuka kepada wakilnya Djarot Saiful Hidayat, adalah ciri gaya komunikasi ketiga.

Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang mau disampaikan Ahok dengan komunikasi politik dan gaya berpolitik yang tidak lazim bagi seorang pemimpin di sebuah Negara yang belum siap dengan keterusterangan? Kebenaran apa yang mau diwariskan Ahok kepada bangsa yang enggan beradaptasi kejujuran? Apakah Ahok mau memperjuangkan sebuah kejujuran dengan sikap berlawanan dengan sikap sebagian besar pemimpinan?

Dalam sebuah buku, *The Ahok Way*, yang ditulis Piter Randan Bua,

Ahok mengatakan, “*orang benar dan penipu sama-sama akan mati. Masalahnya orang mau memilih mati sebagai pembohong atau sebagai orang benar. Tapi saya tidak mau mati konyol sebagai pembohong. Karena itu saya akan berusaha untuk hidup dan berbuat dalam kebenaran*”.<sup>4</sup>

Kontroversi seputar gaya komunikasi politik dan bertindak Ahok yang mengundang perdebatan luas dan manfaat apa yang diperoleh dari komunikasi dan tindakan politik yang tidak biasa inilah yang menjadi obyek kajian penelitian ini. Studi ini berusaha membuat tafsiran hermeneutis atas gaya komunikasi politik dan juga perilaku/tindakan politik Ahok yang dimuat media massa dengan menggunakan salah satu pendekatan etika (filsafat), yaitu utilitarianisme.

### Rumusan Masalah

Studi ini bertolak dari masalah beragamnya reaksi masyarakat, baik rakyat kebanyakan, politisi, dan kalangan akademisi (kaum cerdik cendikia) terhadap cara berkomunikasi dan bertindak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam berbagai kebijakan politik yang diambilnya untuk pembangunan Ibu Kota. Berdasarkan masalah ini maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana memahami gaya berkomunikasi dan bertindak Ahok dan mendudukkannya secara utuh tidak pada tataran sosiopsikologis

<sup>4</sup>Piter Randan Bua, *The Ahok Way: Hidup adalah Kebenaran, Mati adalah Keuntungan*. (Jakarta: Inspiro, 2014), hlm. 29.

subyektif tetapi pada kegunaan otentik dengan menggunakan pendekatan rasional etika utilitarianisme yang berorientasi pada guna/manfaat suatu tindakan dalam konteks peraturan yang berlaku dan bukan pada caranya?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: di satu pihak berusaha menggali makna gaya berkomunikasi dan cara bertindak Ahok menyangkut beberapa kebijakan strategis pemerintahan yang dimuat di berbagai media massa ditinjau dari aspek kegunaan dari model komunikasi dan perilaku politik tersebut; di lain pihak berdasarkan hasil penggalian makna tersebut, penelitian ini berusaha mendudukan persoalan gaya komunikasi dan cara bertindak Ahok secara utuh pada konteknya yang obyektif rasional, yaitu kegunaan otentik melalui analisis arkeologis-hermeneutis, bukan pada penilaian sosiopsikologis subyektif sebagaimana tampak dalam penilaian masyarakat pada umumnya.

### **TINJAUAN TEORI**

#### **Hermeneutika: Prinsip Menafsir**

Ada banyak tokoh di balik munculnya filsafat hermeneutika. Dengan perspektif yang berbeda mereka membuat batasan yang berbeda pula atas konsep hermeneutika tersebut. Schleiermacher, misalnya membatasi hermeneutika sebagai rekonstruksi pemikiran penulis; Atau, Dilthey mewacanakan hermeneutika sebagai

penjelasan berdasarkan keadaan psikologis dan riwayat hidup penulis; Dan, Gadamer memahami hermeneutika sebagai pemahaman atas teks yang lebih baik daripada penafsiran penulisan sendiri.<sup>5</sup>

Hermeneutika berkaitan dengan proses “menafsir” atau “menafsirkan”. Atau, ketika kita mendengar kata “menafsir” atau “menafsirkan” maka kata tersebut langsung dihubungkan dengan sebuah pendekatan filsafat bernama hermeneutika. Pada prinsipnya filsafat hermeneutika adalah ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik obyektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi historisnya), maupun subyektif (maksud pengarang).<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya filsafat hermeneutika juga lebih banyak digunakan kaum strukturalis (teori strukturalisme) untuk menciptakan metode penafsiran yang selalu menerapkan pendekatan filsafat pada persoalan-persoalan kebudayaan umumnya.<sup>7</sup>

Secara prinsip keilmuan hermeneutika menolak pendekatan ilmiah, baik induktif maupun deduktif yang dianggapnya memiliki sifat satu arah. Hermeneutika berusaha memahami teks, tidak saja pada kata-kata saja, tetapi juga keseluruhan teks sebagai sebuah karya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Benny H.Hoed, *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. (Depok: Komunitas Bambu: 2014), hlm., 105.

<sup>6</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm., 283.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 284.

<sup>8</sup>*Op.cit.*, Benny H.Hoed, hlm., 104-105.

Filsafat hermeneutika, dengan demikian, berurusan dengan kerja-kerja, tidak saja menafsirkan, dan atau menginterpretasikan teks *in se*, tetapi juga melampaui itu, yaitu menafsirkan situasi sosial, religius, kebudayaan, politik, dan ekonomi di sekitar teks yang dihasilkan. Atau, filsafat hermeneutika berusaha menafsirkan, menerjemahkan, menginterpretasikan teks dalam konteks sosial dimana teks itu dipahami.

Pada sisi tertentu filsafat hermeneutika disebut sebagai pendekatan yang berdekatan dengan semiotik karenanya hermeneutik adalah tetangga semiotik teks, walaupun sebenarnya hermeneutika usianya lebih tua dari semiotika.<sup>9</sup>

### Hermeneutika Paul Ricoeur

Selain beberapa sarjana (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer) yang disebutkan di atas, Paul Ricoeur tidak bisa diabaikan. Dia menempatkan teks sebagai sesuatu yang sentral dalam penggalan hermeneutisnya. Bagi Ricoeur teks adalah perwujudan dari *speech* (bahasa lisan). *Speech* selalu terikat pada konteks.

Menurut Ricoeur, begitu *speech* menjadi teks, sistem acuannya langsung berubah menjadi milik pembaca. Dengan demikian teks harus dipahami dalam keterkaitan dengan penulis, lingkungan, dan dengan teks lain (intertekstualitas). Teks harus dipahami dalam konteks dialog

antara pembaca dan teks yang dibaca.<sup>10</sup>

Atau, dalam teori hermeneutika diri, Paul Ricoeur, misalnya, mengatakan bahwa pencarian makna identitas diri ditempuh dengan cara kerja interpretasi yang terus menerus karena ia berhubungan dengan pemaknaan tindakan (aksi), pemaknaan kisah subyek tentang dirinya (narasi diri), dan juga pemaknaan ragam bahasa yang digunakan.<sup>11</sup>

Menurut Ricoeur, kerja-kerja menafsir dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) menafsir setiap tindakan dan perbuatan yang terarah kepada hidup yang baik dan menafsir setiap keputusan yang berkenaan dengan tujuan hidup yang baik itu; (2) Tujuan dan keputusan yang baik yang dibuat hendaknya berkenaan dengan makna diri.

Menginterpretasi teks, menafsir pembicaraan, dan menafsir ragam bahasa yang digunakan, pun menafsir tindakan seseorang berarti melakukan ikhtiar menginterpretasi diri. Menurut Ricoeur, tindakan menafsir berarti menganyam, merajut, dan merangkai kembali seluruh aspek diri sebagai satu kesatuan dari beragam pembicaraan, bahasa, tindakan, dan perbuatan. Hidup yang baik adalah hidup yang diputuskan dan dijalankan secara baik dan benar.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Ibid., hlm., 105-106.

<sup>11</sup>Felix Baghi, "Narasi Diri, Yang Lain dan Institusi Yang Adil (Hermeneutika Diri dan Etika Politik Paul Ricoeur)", dalam Jurnal Ledalero, *Wacana Iman dan Kebudayaan*. (Maumere: Ledalero, 2012), hlm., 62.

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid., hlm., 100-101.

Tindakan menafsir adalah tindakan menginterpretasikan suatu peristiwa, tindakan, dan ucapan (bahasa) untuk menemukan makna baru sesuai konteks kekinian dan di sini, *hic et nunc*. Setiap peristiwa, teks, tindakan, dan ucapan adalah referensi yang selalu diacu dalam sebuah interpretasi dan penafsiran.

Menurut Ricoeur, apa yang diacukan seseorang kepada sesuatu itulah peristiwa, namun peristiwa memperoleh struktur maknanya dari makna sebagai makna. Sebuah makna baru diketahui dengan memberikan acuan pada maksud pembicara. Dengan demikian dialektika antara peristiwa dan makna mendapatkan pengalaman barunya dari dialektika antara makna dan referensi.<sup>13</sup>

### **Komunikasi Politik**

Gabriel Almond dan Powell<sup>14</sup> mendefinisikan komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik. Bagi mereka komunikasi politik merupakan prasyarat bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lainnya.

Dalam batasan yang sangat sederhana Roelofs<sup>15</sup> berpendapat bahwa komunikasi politik adalah

pembicaraan tentang politik atau kegiatan politik adalah berbicara.

Astrid S. Soesanto<sup>16</sup> mendefinisikan komunikasi politik dengan menggunakan perspektif hukum. Menurutnya komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai sebuah model komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Atau, dengan menggunakan perspektif interpretatif dan transaksional, Deddy Mulyana<sup>17</sup> mendefinisikan komunikasi politik sebagai pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan. Pesan politik yang dipertukarkan bisa disengaja ataupun tidak, baik verbal ataupun nonverbal.

Bertolak dari perspektif interpretatif ini, menurut Mulyana bahwa komunikasi politik di Indonesia lebih condong dikonseptualisasikan sebagai komunikasi politik dinamis, mudah berubah, rumit, dan bahkan sulit diramalkan. Komunikasi politik lebih condong kepada model komunikasi politik konteks tinggi, karena lebih banyak menampilkan pesan tersirat daripada tersurat, termasuk didalamnya pemanfaatan

---

<sup>13</sup>Paul Ricoeur. *Teori Interpretasi, Membelah Makna dalam Anatomi Teks*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm., 48-49.

<sup>14</sup>Diakses dari <http://www.psychologymania.com/2013/12/pengertian-komunikasi-politik-menurut.html>, tanggal 04 desember 2015, jam 08:43

<sup>15</sup>Ibid.

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Prof. Deddy Mulyana, MA., Ph.D., *Komunikasi Politik Politik Komunikasi. Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik* (Bandung: Rosda Karya, 2013), hlm., 10 – 11.

gestikulasi (bahasa tubuh, busana, dan diam).<sup>18</sup>

Dengan mengacu pada konsep dasar komunikasi politik yang digambarkan di atas, sebagai pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan, maka secara fungsional komunikasi politik dapat diimplementasikan ke dalam beberapa fungsi, antara lain: agregasi, artikulasi, sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, dan interaksi.<sup>19</sup>

Fungsi agregasi dimaksudkan sebagai upaya menampung aspirasi rakyat; artikulasi dalam artian menyampaikan aspirasi rakyat lewat pranata atau lembaga politik (partai); sosialisasi dalam pengertian menyampaikan informasi program tertentu kepada masyarakat; partisipasi dalam artian mengajak keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik penting; rekrutmen dalam artian pengangkatan anggota masyarakat yang memiliki keahlian untuk terlibat dalam membesarkan organisasi politik; dan fungsi interaksi berarti menjalin relasi saling mendukung bagi setiap aktor politik dalam membangun stabilitas politik.

Dalam artian yang demikian maka komunikasi politik bisa pula dipahami sebagai upaya pemasaran, dimana politik dijadikan komoditas yang layak dijual kepada publik

(rakyat, masyarakat). Yang dipasarkan dalam politik adalah komoditas gagasan sosial dari tokoh politik pun dari partai politik.<sup>20</sup>

### **Gaya Komunikasi dan Perilaku Politik**

Norton, Kirtley & Weaver mendefinisikan gaya komunikasi sebagai proses kognitif yang mengakumulasi bentuk suatu konten agar dapat dinilai secara makro. Setiap gaya komunikasi selalu merefleksikan bagaimana setiap orang menerima dirinya ketika dia berinteraksi dengan orang lain.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini gaya komunikasi selalu dipahami sebagai cara khas seseorang menyampaikan pesan, entah verbal, nonverbal pun bahasa tulisan. Setiap orang memiliki cara atau gaya sendiri dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Gaya berkomunikasi bersifat personal. Gaya komunikasi adalah kepribadian<sup>22</sup> seseorang karena itu sulit berubah. Gaya komunikasi adalah ciri khas pribadi. Sulit merubah gaya komunikasi sama sulitnya memaksa oranglain merubah gaya komunikasinya karena gaya komunikasi sudah melekat pada pribadinya.

Gaya komunikasi berperan menentukan batas-batas tentang kenyataan dunia yang sedang dihadapi, tentang relasi dengan

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 10

<sup>19</sup>Dr. Muhammad Aras, M.Si. *Komunikasi Politik: Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Binus Media & Publishing, 2014), hlm. 2 – 35.

<sup>20</sup>Dr. Solatun Dulah Sayuti, Drs., M.Si. *Komunikasi Pemasaran Politik*. (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm., 7.

<sup>21</sup>Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm., 309.

<sup>22</sup>Ibid., hlm., 308.

sesama, dan tentang hubungan dengan konsep tertentu.

Dalam prakteknya gaya komunikasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: gaya agresif, pasif, dan asertif<sup>23</sup>. Ketiganya tidak bisa diterapkan sekaligus dalam satu peristiwa komunikasi yang sama. Atau, sangat sedikit orang berkomunikasi dengan menggunakan tiga gaya ini secara serentak, orang hanya bisa melakukan kombinasi gaya sesuai dengan konteksnya.

Gaya komunikasi agresif misalnya, dilakukan ketika orang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan dengan cepat, keadaan darurat, atau kalau anda tahu anda benar, atau untuk merangsang kreativitas melalui kompetisi, atau saat kritis (emosi meningkat, kekuatan anda jauh melampaui lawan anda, atau posisi orang lain tidak mungkin bisa mengubah kebijakan publik).

Dalam ilmu komunikasi kita juga mengetahui adanya gaya komunikasi langsung (*Low Context*) dan komunikasi tidak langsung (*High Context*)<sup>24</sup>. Dalam komunikasi *Low Context*, apa yang mau dikatakan dikatakan secara terbuka, blak-blakan, terus terang, kejujuran dasar penentuan kebijakan, mengutamakan heterogenitas, tanda-tanda nonverbal tidak penting, fakta lebih penting daripada cara menyampaikan fakta tersebut, harmoni tidak selalu dibutuhkan, konfrontasi diperlukan untuk mengasah kecerdasan, dan lain-lain.

Sementara dalam komunikasi *High Context*, komunikasi berjalan tidak langsung, berbelit-belit, mengutamakan homogenitas, pernyataan selalu bersifat implisit, kata yang diucapkan belum tentu menunjukkan apa yang diinginkan, peranan tanda nonverbal lebih penting, selalu menjaga harmoni, tidak selalu menyukai konfrontasi, dan lain-lain.

Gaya komunikasi politik erat berhubungan dengan perilaku politik (*Political Behavioural*), bahkan perilaku politik seseorang dapat dibaca lewat komunikasi politiknya.

Perilaku politik berkenaan erat dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Dalam konteks yang lain perilaku politik meliputi tanggapan internal, seperti persepsi, sikap, keyakinan, dan tindakan-tindakan nyata, dalam hal ini pemberian suara, lobi, ketepatan mengambil keputusan, pertimbangan risiko atas keputusan termasuk dalam kategori perilaku politik.

Ketepatan mengambil keputusan dalam perilaku politik sangat pula bergantung pada budaya politik yang berkembang dan dianut dalam suatu masyarakat, bangsa, atau negara di mana sebuah keputusan politik diambil.

### **Etika Utilitarianisme**

Utilitarianisme berasal dari kata "*utilis*" (bahasa Latin), yang berarti berguna atau manfaat. Teori ini sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm., 320.

<sup>24</sup> Ibid., hlm., 320-321.

---

<sup>25</sup> Lorens Bagus, Op.cit., hlm., 1144

Jeremy Bentham adalah filsuf Inggris pertama yang merumuskan prinsip utilitarianisme sebagai kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin (*the greatest happiness for the greatest number*). Menurut Bentham prinsip ini harus mendasari kehidupan politik dan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dari kodratnya, kata Bentham, manusia ditempatkan di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat sekaligus, yaitu: penguasaan ketidaksenangan dan penguasaan kesenangan. Suatu kebahagiaan dicapai kalau manusia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan.<sup>27</sup>

Ajaran etika utilitarianisme Bentham kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya John Stuart Mill. Menurut Mill, kebahagiaan adalah ukuran dasar yang menyangkut apa yang benar dalam perilaku bukanlah kebahagiaan si pelaku sendiri, melainkan semua orang yang terlibat. Menyangkut kebahagiaan diri dan orang lain, karena itu utilitarianis menuntut orang untuk bersikap keras, tidak pilih kasih, berlaku seperti penonton yang baik hati dan tanpa pamrih.<sup>28</sup>

Mill membedakan kesenangan antara kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah dan kemudian menerapkannya pada pandangan

etisnya.<sup>29</sup> Kesenangan manusia adalah harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan binatang, bahkan dia katakan kesenangan seorang seperti Sokrates lebih tinggi daripada kesenangan seorang dungu.<sup>30</sup>

Utilitarianisme menuntut perhatian terhadap kepentingan semua orang yang dipengaruhi oleh sebuah tindakan, termasuk kepentingan si pelaku sendiri<sup>31</sup>. Kees Bertens<sup>32</sup>, membedakan dua macam utilitarianisme, yaitu utilitarianisme perbuatan dan utilitarianisme aturan. Prinsip utama dari utilitarianisme tindakan (perbuatan) adalah "*Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*"<sup>33</sup>, dan utilitarianisme memiliki prinsip dasariah "*Bertindaklah menurut kaidah/ peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/ kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*".<sup>34</sup>

Studi ini dikhususkan untuk mengkaji seluruh bangunan cara berkomunikasi khususnya, dan cara berpolitik/bertindak Ahok dalam jagat politik DKI, pada umumnya dalam dua perspektif utilitarianisme, baik tindakan maupun peraturan/kaidah.

<sup>26</sup>Franz Magnis-Siseno, *13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani sampai Abad-19*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm., 180.

<sup>27</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm., 247.

<sup>28</sup>James Rachels (terjemahan), *Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm., 187-188.

<sup>29</sup>Lorens Bagus, *Op.cit.*, hlm., 1145.

<sup>30</sup>K. Bertens, *op.cit.*, hlm., 249.

<sup>31</sup>Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm., 125

<sup>32</sup>K. Bertens, *op.cit.*, hlm., 252.

<sup>33</sup>Lorens Bagus. *Op.cit.*, hlm. 1144.

<sup>34</sup>*Ibid.*

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian ini dikembangkan dengan cara, yaitu: (1) mengumpulkan beberapa pernyataan dan perilaku politik Ahok yang dimuat di media massa, terutama yang menyita perhatian publik karena kontroversinya, baik dari sisi komunikasi maupun sisi efek atau reaksi publik atas cara berkomunikasi atau berperilaku tersebut; (2) Pernyataan politik dan tindakan Ahok dikumpulkan dari berbagai sumber media massa, baik cetak, elektronik, maupun media sosial.

### **Pengembangan Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang dikembangkan adalah menafsir realitas komunikasi dan tindakan politik Ahok yang menyita perhatian masyarakat. Kerangka konseptual difokuskan pada kerja hermeneutis interpretatif. Cara berkomunikasi dan tindakan Ahok dijadikan sebagai obyek atau teks dimana sebuah makna digali dengan menggunakan perspektif etika (filsafat) utilitarianisme.

### **Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif subyektif dan interpretatif. Dengan paradigma kritis penelitian ini berusaha untuk menempatkan gaya komunikasi dan tindakan Ahok pada konteksnya yang obyektif sambil membaca dengan cermat reaksi masyarakat pada umumnya, bahkan reaksi para korban atau yang

dikorbankan oleh gaya komunikasi dan tindakan politik tersebut.

Dengan paradigma ini kritis penelitian berusaha mengambil jarak dengan berbagai reaksi spontan masyarakat, dan bahkan juga reaksi para korban terhadap gaya komunikasi dan bertindak Ahok sehingga dapat ditemukan sisi kebermanfaatan dan kebergunaan otentik dari gaya komunikasi dan cara bertindak Ahok untuk kemaslahatan banyak orang di DKI Jakarta.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perspektif teori etika utilitarianisme, yang mengarahkan seluruh kajian mengenai baik buruk sebuah gaya komunikasi dan tindakan politik diukur dari kegunaan dan kebermanfaatan dari tindakan tersebut, bukan tafsiran subyektif atas siapa pelaku komunikasi dan tindakan tersebut. Peneliti akan berusaha mengkaji, atau lebih tepatnya “memotret” cara berkomunikasi dan cara berperilaku/tindakan politik Ahok dari sudut pandang etika utilitarianisme tersebut, terutama prinsip dasarnya, yaitu: (1) utilitarianisme tindakan, *“bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”*, dan, (2) utilitarianisme peraturan, *“Bertindaklah menurut kaidah/ peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”*.

## DISKUSI / PEMBAHASAN

### Sekilas Riwayat Hidup Ahok

Terlahir dengan nama Zhong Wan Xie, atau “Ahok” (panggilan khas orang Hakka), dari kedua orang tua, Zhong Kim Nam dan Nen Bun Caw, pada tanggal 29 Juni 1966 di Gantung, Belitung Timur. Dia adalah sulung dari empat bersaudara: Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety, dan Harry Basuki. Kelahiran Ahok digambarkan terjadi beberapa bulan sesudah demonstrasi besar mahasiswa menggoyang kekuasaan Soekarno. Atau, Ahok lahir dalam kondisi politik yang panas pasca gerakan pemberontakan PKI 30 September 1965.<sup>35</sup>

Bersamaan dengan larangan menggunakan nama China di zaman Orde Baru melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, maka Zhong Kim Nam, ayah Ahok menggubah namanya menjadi Indra Tjahaja Purnama, sedangkan isterinya Nen Bun Caw menjadi Buniarti Ningsih, sementara putra kesayangannya Zhong Wan Xie, dipilih nama “pribumi” Basuki Tjahaja Purnama.

Masa kecil dihabiskan di kampung halamannya, Gantung. Sejarah pendidikan SD-SMP juga berlangsung di Gantung. Tahun 1984 Ahok melanjutkan SMA-nya di SMA III PSKD Jakarta. Selepas SMA melanjutkan pendidikan tinggi

di Universitas Trisakti, Jakarta mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil dirampungkannya tahun 1989. Kemudian Ahok kembali kampung halamannya mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor.

Setelah dua tahun menjadi kontraktor Ahok memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta tahun 1994 mendalami bidang manajemen keuangan. Setelah mendapat gelar Master in Business Administration (MBA)/Magister Manajemen (MM) dia diterima bekerja di PT Simaxindo Primadaya, sebuah perusahaan kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Namun, tahun 1995 dia memutuskan berhenti bekerja dan kembali ke kampung halamannya mendirikan PT. Nurindra Ekapersada di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. PT diharapkan dapat menjadi proyek percontohan untuk menyejahterakan rakyat dan berkontribusi pada pendapatan asli Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas.

Kemudian, Ahok menikahi Veronika Tan, gadis yang aktif sebagai pianis di Gereja, tanggal 6 September 1997. Dari pernikahan keduanya lahir tiga orang putera dan puteri: Nicholas, Nathania, dan Daud Albeener.

### Ahok dan Politik

Kapan Ahok tertarik untuk terlibat dalam dunia politik? Sulit

<sup>35</sup>Agus Santosa, *Hargaku adalah Nyawaku: Basuki Tjahaja Purnama, Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi*. (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm., 5.

menjawab pertanyaan ini dengan pasti? Dikisahkan:

“Pada tahun pertama menjalankan Nurindra Ekapersada, Ahok bertengkar dengan seorang oknum pejabat pemerintah daerah, yang nyaris membuat bisnis rintisan itu tamat. Ia tidak sabar menghadapi permainan kotor dalam penambangan pasir kuarsa. Ahok juga sudah lelah hati berurusan dengan orang-orang Tambang Timah selama menjalankan perusahaan ayahnya. Kebetulan seorang teman di Kanada menawarinya untuk bekerja di negeri benua Amerika itu. Ahok yang sedang goyah dan putus asa merasa mendapatkan jalan keluar. Ia mengutarakan niatnya kepada ayahnya, “Pa, saya ingin pindah ke Kanada. Percuma, saya nggak cocok tinggal di negeri ini. Negara itu sudah kadung rusak. Sudah nggak ada harapan lagi.” Kim Nam sudah sering mendengar anak sulungnya mengeluh, tetapi ia sedikit terkejut mendengar rencana Ahok eksodus dari Indonesia. “Kamu tidak boleh keluar negeri, karena rakyat miskin membutuhkan kamu, Hok. Soeharto bisa turun! Indonesia bisa berubah.” Pokoknya saya mau pindah ke Kanada!” Ahok memaksa diri dan mengeraskan hati. “Nggak boleh!” jawab tegas ayahnya. “Apa yang dibutuhkan rakyat dari saya, Pa? Mana mungkin muka minyak

babi seperti kita ini bisa jadi pejabat? Wajar Soeharto bisa turun, dan memang pasti bisa turun, sebab dia sudah tua!” Ahok sedikit mulai kesal terhadap sikap ayahnya. “Kamu dengar baik-baik, kamu lihat saja! Saya mungkin sudah nggak bisa lihat kamu. Tapi suatu hari kelak, rakyat akan pilih kamu untuk membela haknya!” tegas Kim Nam mengunci pembicaraan, dan Ahok pun terdiam.<sup>36</sup>

Disadari, atau tidak disadari Ahok, barangkali dialog penuh emosional inilah awal kilas balik kesadaran politik Ahok dimulai. Pada kesempatan lain Ahok bercerita:

“Sejak kecil saya melihat bagaimana bapak saya dengan mudahnya membantu orang. Bahkan dia rela untuk berhutang demi bisa membantu rakyat. Secara perlahan saya pun jadi ikut mencontoh papa. Papa saya mengatakan bahwa jika saya suka lawan pejabat dan suka bantu orang miskin, lebih baik jadi pejabat saja karena kita tidak akan pernah punya cukup uang untuk bantu orang miskin. Karena pengalaman pahit pribadi, beban sosial di hati nurani saya, dan keyakinan di atas, saya memutuskan untuk berpolitik.”<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Ibid., hlm., 43.

<sup>37</sup>Ki Ageng Jayakarta, *Duet Wong Ndeso Memimpin Jakarta*. (Yogyakarta: Manasuka, 2012), hlm. 141.

Mulailah Ahok tercebur dalam gemuruh pertarungan sekaligus pertarungan di panggung politik. Tahun 2004 dia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pimpinan seorang ekonom Indonesia Sjahrir (alm.) dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Selama menjadi anggota DPRD Ahok menyaksikan dengan geleng-geleng kepala banyaknya praktik korupsi terjadi. Pada tahun 2005, atas aspirasi rakyat, Ahok maju menjadi salah satu calon Bupati Belitung Timur untuk periode 2005-2010. Dia terpilih. Selama menjadi Bupati dia melakukan banyak hal, terutama mengentaskan kemiskinan. Dia membantu banyak orang dari semua suku, ras, agama bahkan pernah memberangkatkan haji para penjaga masjid. Kiprah Ahok di dunia politik terus berlanjut.

Tahun 2007 dia menjadi salah satu calon Gubernur Bangka Belitung, namun gagal karena disinyalir terjadi banyak manipulasi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Tahun 2009, Ahok melaju ke Senayan menjadi anggota legislatif melalui Partai Golkar.

Di komisi II DPR Ahok dikenal karena kejujuran dan sikap apa adanya. Dia anggota DPR yang konsisten berjuang untuk rakyat: memerangi korupsi, membela rakyat, transparan, dan membuka semua pendapatan dan laporan keuangan di situs miliknya.

Tahun 2012, Ahok maju menjadi calon wakil gubernur bersama Joko Widodo sebagai calon

gubernur DKI Jakarta melalui Partai Gerindra. Visinya adalah memerangi korupsi dan mendukung pemerintahan yang jujur, transparan, dan memihak kepada masyarakat.

Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden 2014, membuka jalan bagi Ahok untuk secara otomatis mengisi kursi Gubernur DKI yang ditinggalkan Joko Widodo.

Dalam banyak kesempatan Ahok selalu mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan jabatan. Fokusnya hanya membenahi kualitas pelayanan pemerintah pada rakyat dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 19 November 2014 resmilah Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang dilantik pendahulunya Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan, tahun 2017 adalah tahun pertarungan kedua seorang Ahok untuk kembali membuat gebrakan bagi Jakarta baru, Jakarta perubahan.

### **Gebrakan Ahok: Kontroversial Komunikasi dan Tindakan Politik**

Sepeninggal Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, posisi Gubernur DKI yang ditinggalkannya otomatis jatuh ke tangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pasangannya pada pemilihan Gubernur (pilgub) 2012-2017. Sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta tindakan Ahok, baik dari sisi komunikasi politik dan juga tindakan-tindakan politiknya selalu diwarnai kontroversi, dan bahkan menimbulkan perdebatan, tidak saja bagi para lawan politik (di DPR), anak buahnya di Pemerintahan

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pengamat, media massa, tetapi juga bagi masyarakat kebanyakan yang menganggap bahwa cara berkomunikasi dan bertindak Ahok digolongkan tidak lazim.

Ketidaklaziman tersebut tentu terpusat pada dua masalah pokok, yaitu cara menyampaikan pesan politik di satu pihak dan cara bertindak politik atau lebih tepatnya “gebrakan” politiknya, di pihak lain. Pada bagian ini peneliti berusaha mengungkap berbagai kontroversi komunikasi politik yang dibuat Ahok, juga tindakan/gebrakan politiknya beserta reaksi masyarakat atas dua masalah pokok tersebut.

#### **Kontroversi Komunikasi Politik**

Menurut catatan media, sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan politik. Tahun 2013, berawal dari kekesalan Ahok terhadap warga yang bertahan tinggal di kawasan Waduk Pluit dan mengokupasi tanah negara secara ilegal, Ahok menyebut warganya sebagai komunis. Dengan nada setengah berteriak Ahok berkata:

“Kalau saya bangun rumah di tanah yang bukan milik saya tanpa izin, dibongkar P2B, saya minta ganti rugi nggak sama pemerintah? Dapat? Mana ada? Ya, mampus semuanya. Udah bangun salah, dikasih duit gitu, lho. Terus saya bangun di tanah negara, terus saya sewa-sewain sama orang, dibongkar, minta

ganti rugi. Mana ada hukumnya. Itu komunis namanya”.<sup>38</sup>

Ahok mengancam warga yang bertahan akan dilaporkan ke polisi: “Kalau nggak mau kita tangkap, lapor polisi, enak saja emangnya komunis main duduk-dudukin. Kalau legal tanda tangan surat perjanjian”.<sup>39</sup> Ahok pernah pula menyebut warganya sebagai orang miskin. Masih dalam konteks penggusuran dan normalisasi Waduk Pluit, kepada warga yang tidak mau direlokasi ke rumah susun yang telah disiapkan Pemprov, Ahok berkata: “Dikasih rusun nggak mau, maunya rumah yang rata. Ya, kalau miskin tahu dirilah”.<sup>40</sup>

Tidak hanya kepada para warga, komunikasi gaya “*to the point*” Ahok pun pernah dirasakan para bawahannya. Dia pernah menyebut anak buahnya sebagai “*bajingan*” karena tidak mampu beradaptasi dengan irama kerjanya. Dia juga beranggapan bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta tidak ada yang berani bermain dengan uang rakyat. Kekesalan Ahok memuncak ketika mengetahui adanya para pejabat DKI yang terlibat dalam jual beli dan sewa menyewa rumah susun (rusun).

“Saya sudah betul-betul muak dengan kemunafikan. Pejabat-pejabatn DKI ini luar biasa santun sekali kalau ngomong sama saya, tetapi ternyata

<sup>38</sup>Inilahcom, diakses tanggal 15/05/2016, jam 15:15.

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Suaranews.com, diakses tanggal 15/05/, jam 15:20.

mereka bajingan semua. DKI sudah susah-susah bangun ribuan rumah, yang menikmati malah calo-calo dan pejabat, warga miskin setor ke mereka. Saya nanti minta Pak Heru, menambah sembilan pistol isi 21 peluru buat tembak di tempat karena di Jakarta ini bajingannya dari rakyat jelata sampai para pejabat, kata Ahok”.<sup>41</sup>

Selain menyebut anak buahnya “*bajingan*” dan munafik Ahok pernah pula mencap mereka sebagai “*brensek*” karena sering memfitnah dirinya karena adanya pengakuan seorang pegawai pintu air Manggarai yang gajinya belum dibayar dan diduga sengaja ditahan oknum di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. “*Minta tolong kalau wawancara sama PNS, catat nama dan pangkatnya siapa, kalau rekamannya jelas, saya kasih sanksi. Brensek sekali main fitnah. Saya khawatir ada oknum di PU sengaja nahan uang ini supaya sampah berantakan di mana-mana*”.<sup>42</sup> Untuk para politisi yang sering menggunakan jasa paranormal guna meraup suara para pemilih sebanyak-banyaknya, juga tidak luput dari gaya komunikasi “terus terang” Ahok. Dia pernah menyebut perilaku mereka sebagai tindakan “*bego*”.

Dan, yang terheboh, tentu kata-kata kasar Ahok dalam sebuah wawancara langsung *Kompas TV*, 17

Maret 2015 bersama presenter Aiman Witjaksono, terkait kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI antara dirinya dengan DPRD. Dalam wawancara langsung *Kompas TV*, Ahok berkali-kali menyebut kata “*tai*” untuk menggambarkan perilaku para anggota DPRD DKI. Berikut transkrip lengkap yang dikutip dari *Viva.co.id*.<sup>43</sup>

**Aiman:** Ada anggaran siluman Rp12,7 triliun yang mau dimasukan dalam APBD?

Bagaimana menurut Anda?

**Ahok:** (DPRD mau) Mau beli tanah, mau beli alat berat, mau beli truk sampah, itu dimasukkan.

**Aiman:** Itu yang anda bilang suap?

**Ahok:** Ya, gua bilang itu nggak guna. Ganti sama ups-ups, itu nggak guna bos.

**Ahok:** Kita sudah punya nih (peralatan yang dianggarkan). Lu jangan buat ini dong, eh dibalikin ini yang buat suap, sialan gak tuh.

**Ahok:** Makanya gua bilang, panggil gua ke angket. Biar gua jelasin semua. Biar gua bukain tai-tai semua dia seperti apa.

**Aiman:** Pak Ahok, kita sedang live nih pak.

**Ahok:** Gak apa-apa, biar orang tau emang tai. Gua bilang tai itu apa, kotoran, ya silahkan.

**Aiman:** Mungkin bisa lebih diperhalus Pak Gubernur DKI Jakarta, dengan segala hormat.

**Ahok:** Kalau gua mau ngomong

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Nilahcom, diakses tanggal 15/05/2016, jam 15:50.

<sup>43</sup>Viva.co.id, tanggal 18 Maret 2015.

tai, terus mau apa. Wawancara *live* gua, ya risikonya gitu. Kompas TV jangan pernah wawancara gua *live* kalau gak suka kata gua tai segala macam. Itu bodohnya anda mau *live*, lain kali rekaman aja biar bisa anda potong.

Kalimat bernada “*umpatan*” Ahok ini, menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, baik yang bernada keras maupun yang melihatnya dari sudut pandang berbeda; baik disampaikan mewakili organisasi maupun atas nama perorangan. Sebagai lembaga setingkat dalam jalur pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), DPRD DKI Jakarta langsung bereaksi keras dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai kelanjutan dari Hak Angket. Menurut mereka Ahok tidak memiliki etika sebagai kepala daerah.

Dalam waktu hampir bersamaan 90 organisasi masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Masyarakat Jakarta<sup>44</sup> menggelar demonstrasi dan mengajukan petisi menolak gaya komunikasi Ahok dan menuntutnya untuk mundur atau dilengserkan.

Reaksi yang tidak kalah kerasnya datang dari DPR RI. Ketua Komisi I DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq harus mengeluarkan surat terbuka berisi protes terhadap gaya komunikasi Ahok, yang menurutnya

akan memperburuk krisis moral bagi kaum muda.<sup>45</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagai organisasi yang mengawasi peraturan, pedoman, dan standar program penyiaran mengecam keras gaya komunikasi sang Gubernur. Dengan berargumentasi bahwa televisi adalah lembaga penyiaran publik, KPI sangat menyayangkan model komunikasi Ahok.

“Televisi disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang. Malah juga disaksikan anak-anak dan remaja. Ini menjadi contoh yang buruk. Jadi penggunaan kata-kata dan bahasa tidak bisa sembarangan terutama di ruang publik,” kecam Agatha Lily, dari Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI.<sup>46</sup>

Namun, bagi pakar komunikasi politik, Deddy Mulyana, fenomena komunikasi politik Ahok dan DPRD DKI Jakarta, di satu sisi dilihat sebagai buah langsung dari sebuah era kebebasan berpendapat, namun di sisi lain, pola komunikasi seperti ini dapat dilihat sebagai gambaran atau bentuk ketidaksiapan masyarakat Indonesia memasuki era kebebasan berpendapat<sup>47</sup> itu sendiri.

“Kenyataan bahwa masyarakat saat ini belum siap memasuki era kebebasan berpendapat bisa dilihat di media sosial atau

---

<sup>44</sup>Metrotvnews.com, tanggal 26 Februari 2015.

---

<sup>45</sup>Okezone.com, tanggal 19 Maret 2015, jam 21:21.

<sup>46</sup>Tribunenews.com, tanggal 18 Maret 2015.

<sup>47</sup>Republika.co.id, tanggal 08 Maret 2015.

komentar pada media daring. Pesatnya situs berita *online* dan mudahnya masyarakat ikut berkomentar di berbagai situs membuat masyarakat bebas berkomentar tanpa pertimbangan yang matang. Harusnya komentar itu membangun. Memberikan dampak positif. Tidak sekedar kritik atau sebatas umpatan dan makian. Faktor penokohan juga penting. Media massa saat ini sangat mudah memuat apapun yang terlontar dari mulut seorang pejabat publik. Karena umpatan ini keluar dari mulut anggota DPRD jadilah bombastis. Media harusnya bisa selektif mana saja yang baik untuk dipublikasikan. Semua pejabat publik pun harus bisa memilah cara komunikasi politik yang baik”, kata Deddy<sup>48</sup>.

Emrus Sihombing, seorang pengamat komunikasi politik, menilai gaya komunikasi Ahok di depan publik tidak wajar dan mencerminkan karakter yang tidak mengindahkan etika komunikasi politik. Gaya komunikasi otoriter. Pemberantasan korupsi yang sering menjadi alasan Ahok tidak dibenarkan karena korupsi juga harus dilawan dengan komunikasi yang beretika.<sup>49</sup>

Untuk menilai pantas tidaknya gaya komunikasi “kasar” Ahok, menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, sangat bergantung pada

kultur mana melihatnya. “... mungkin kalau di sini (Jakarta) agak kaget dengan sikap Ahok seperti ini, tetapi kalau di Sumatera ya, mungkin sikap Ahok itu ya dianggap biasa saja”.<sup>50</sup>

Begitu juga, anggota Komisi II DPR RI dari PDI-P, Jarot Saiful Hidayat (sekarang Wakil Gubernur Ahok) menilai bahwa setiap orang memiliki gaya sendiri dalam berkomunikasi sebagai karakter yang keluar dari hati nurani yang baik, tulus, dan tujuan yang baik. Gaya komunikasi Ahok menggambarkan kepemimpinan dari nilai dan konsistensi bagaimana menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa perubahan itu bisa dilakukan.<sup>51</sup>

Tanggapan Jarot Saiful Hidayat diamini Ketua Fraksi PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Dia tidak mempermasalahkan gaya komunikasi Ahok yang sudah menjadi bawaan diri dan latar belakangnya.<sup>52</sup>

Dan, seorang *blogger Kompasiana* menilai gaya komunikasi Ahok sangat buruk tetapi sikap tegas dan perjuangannya tetap didukung. Sebuah sikap dan langkah yang membutuhkan keberanian tingkat tinggi, patut diapresiasi dan diacungi jempol. Namun, gaya komunikasi harus diperbaiki. Berani dan tegas tidak harus kasar. Keberanian dan

<sup>50</sup>Www.aktual.com, tanggal 18 Oktober 2014, Jam 5.36.

<sup>51</sup>Kompas.com, tanggal 29 November 2014, jam 14:58.

<sup>52</sup>CNN Indonesia, tanggal 04 Juni 2015, jam 15:08.

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Sindonews.com, tanggal 27 Maret 2015.

ketegasan bisa dikemas dengan komunikasi yang baik.<sup>53</sup>

Itulah beberapa kontroversi gaya berkomunikasi dan reaksi masyarakat atas bangunan komunikasi yang dikonstruksi Ahok dalam membangun Provinsi DKI, Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Salahkah cara berkomunikasi seperti ini? Berlebihkah reaksi masyarakat atas gaya komunikasi seperti ini?

### **Kontroversi Tindakan Politik**

Gaya komunikasi Ahok berjalan beriringan dengan gebrakan atau tindakan politiknya yang selalu melahirkan kontroversi di masyarakat. Sejak menjadi Wakil Gubernur bersama pasangannya Gubernur Joko Widodo mereka sering mempertontonkan gebrakan yang tidak biasa, bahkan bisa disebut kontroversial. Sebagai bentuk evaluasi satu tahun umur pemerintahannya bersama Gubernur Joko Widodo, media mencatat, enam gebrakan mencengangkan yang berhasil dilakukan<sup>54</sup>, antara lain: (1) Pemangkasan dan Transparansi Anggaran Pemprov DKI Jakarta; (2) Perbaikan Pengelolaan Rumah Susun (Rusun) Marunda; (3) Perbaikan Pelayanan Birokrasi Pemprov DKI Jakarta; (4) Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi; (5) Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang; (6) Promosi Pulau-pulau di

Wilayah DKI Jakarta sebagai Tempat Wisata.

Sementara semenjak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok sendiri berhasil mencatatkan beberapa gebrakan kontroversial yang menuai protes masyarakat. *Top Stories Kompas.com* merekam kurang lebih lima kebijakan Ahok yang menuai kontroversi, antara lain: (1) Pelarangan Sepeda Motor Lewat Jalan Protokol; (2) Relokasi Warga (Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan lain-lain); (3) Larangan Penjualan Hewan Kurban di Sembarang Tempat; (4) Pembatasan Lokasi Unjuk Rasa; dan (5) Bongkar Pasang Pejabat.<sup>55</sup>

Sebagaimana gaya komunikasinya yang mengundang protes dan perdebatan luas, tindakan politik melalui lima gebrakan di atas pun tidak kalah kontroversialnya karena sama-sama menimbulkan reaksi massif dari masyarakat. Protes terhadap larangan sepeda motor melintas di dua jalan protokol (Jalan MH Thamrin dan Jalan Merdeka Barat), ditentang para tukang ojek yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta. Mereka demonstrasi di depan Balai Kota menuntut pencabutan aturan tersebut karena langsung berdampak pada menurunnya pendapatan mereka.<sup>56</sup>

Kebijakan Ahok merelokasi warga (Kampung Pulo, Kali Jodo, Pasar Ikan, Luar Batang, dan lain-lain) juga mendapat protes luas. Bentrokan aparat dengan warga yang menolak relokasi di Kampung Pulo, misalnya menimbulkan suasana

---

<sup>53</sup>Badiyo, "Gaya Komunikasi Ahok", dalam *Kompasiana.com.*, tanggal 06 Maret 2015, diakses 16/05/2016, jam 17:00.

<sup>54</sup>*Kompasiana.com*, tanggal 27 Agustus 2013.

---

<sup>55</sup>*Kompas.com*, tanggal 18 Mei 2016.

<sup>56</sup>*CNN Indonesia*, tanggal 08 Januari 2015.

mencekam. *Kompas.com* menggambarkan bahwa warga begitu beringas menimpuki petugas, bahkan warga berhasil memukul mundur petugas. Sebuah *backhoe* yang tertinggal dibakar dan operatornya melarikan diri. Asap hitam terlihat membumbung tinggi.<sup>57</sup> Reaksi yang sama kerasnya terjadi di lokasi relokasi lainnya.

Lewat Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015, tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan, Ahok melarang memotong hewan kurban di sembarang tempat. Instruksi ini mendapat perlawanan dari Front Pembela Islam (FPI) yang dianggap melecehkan umat Islam. Menurut FPI pemotongan hewan kurban di area Masjid dan Sekolah sudah menjadi tradisi dan mengajari anak-anak memiliki rasa berbagi.<sup>58</sup>

Reaksi perlawanan juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228 Tahun 2015, tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Koordinator Kontras, Haris Azhar lewat sebuah surat terbukanya menilai Pergub tersebut tidak saja mencederai hak asasi warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat tetapi juga memperlihatkan pemerintahan yang antikritik.<sup>59</sup>

Selain tindakan-tindakan politik ini, Ahok juga “doyan”

menggonta-ganti pejabat PNS di DKI Jakarta. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta, Abdul Ghoni menilai tindakan bongkar pasang pejabat ala Ahok, sama seperti sistem pengemudi Gojek, yang setiap waktu bisa berganti tanpa sepengetahuan siapapun.<sup>60</sup>

Pengamat Perkotaan, Nirwono Yoga, menilai bahwa bongkar pasang pejabat PNS DKI tidak efektif karena PNS membutuhkan waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan tugas baru yang diembannya.<sup>61</sup> *“Bagus untuk reformasi, tetapi kalau keseringan tidak efektif. Siapa pun orangnya tidak bekerja, ya tidak konsen bekerjalah takut dipecat. Jadi kerjanya juga setengah hati. Harus fair dalam penilaiannya, minimal satu tahun,”* kata Yoga.<sup>62</sup>

Itulah lima tindakan politik Ahok yang menuai banyak kontroversi dan silang pendapat di masyarakat. Pertanyaan bagaimana memahami komunikasi dan tindakan politik Ahok yang tidak biasa ini didudukan pada posisinya yang pas sehingga bisa diterima baik dari sisi argumentasi rasional maupun dari sisi etika komunikasi dimana tindakan tersebut dilakukan? Tafsir hermeneutika Paul Ricoeur berikut mencoba menjelajahi alur analisis komunikasi dan tindakan politik Ahok dipandang dari sisi kegunaan dan manfaat, melalui perspektif utilitarianisme, tindakan dan peraturan.

<sup>57</sup>Kompas.com, tanggal 20 Agustus 2015.

<sup>58</sup>Suara.com, tanggal 10 September 2015.

<sup>59</sup>Kompas.com, tanggal 05 November 2015.

<sup>60</sup>Tribunnews.com, tanggal 06 Oktober 2016.

<sup>61</sup>Metrotvnews.com, tanggal 07 Agustus 2015.

<sup>62</sup>Ibid.

### **Ahok dan Utilitarianisme Tindakan**

Etika utilitarianisme tindakan memiliki prinsip dasarnya sebagai berikut: “*Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*”. Prinsip dasar ini menyasar bahwa sebuah tindakan dianggap benar atau salah secara etis kalau tujuannya memajukan kepentingan banyak orang. Banyak orang diartikan sebagai, termasuk pelaku tindakan dan juga mereka yang menjadi dampak dari tindakan tersebut. Dalam hal ini sebuah tindakan dinilai beretika atau tidak beretika kalau tindakan tersebut menempatkan kepentingan banyak orang di atas semua pertimbangan individu atau kelompok dalam pelaksanaannya. Di sini, dampak dari sebuah tindakan tidak diperhitungkan karena untuk memajukan kepentingan sebanyak mungkin orang dampak atau kerugian individu/kelompok tidak mungkin bisa dihindari. Orang (individu/kelompok) harus menyerahkan otoritas diri (kelompok), baik kepentingan maupun berbagai orientasi ekonominya kepada manfaat yang lebih besar, yaitu kepentingan sebanyak mungkin orang, atau kepentingan banyak orang. Dalam tafsir etika utilitarianisme tindakan ini, bagaimana kita bisa membaca komunikasi dan tindakan politik Ahok dan mendudukannya dalam perspektifnya lain daripada reaksi masyarakat pada umumnya?

Ahok bukannya tidak menyadari apa yang dikatakan dan dilakukannya. Tetapi beban sejarah untuk memajukan kepentingan masyarakat banyak menaklukkan berbagai kepentingan dan sentimen individual yang dimilikinya dalam menerapkan sebuah kebijakan politik.

Merunut pada arkeologi sejarah, semua orang mahfum bahwa hidup Ahok adalah sebuah bangunan sejarah keberpihakan kepada rakyat banyak, dalam hal ini kepentingan semua orang adalah kunci etis di sekitar tindakannya. Penelusuran arkeologis historis justru membenarkan keberpihakan Ahok tersebut. Petuah sejarah untuk berpihak kepada kepentingan orang banyak, telah diwariskan secara alamiah, bahkan bisa disebut sebagai secara “biologis” dari ayahnya.

Figur sang ayah adalah pewaris sekaligus monumen sejarah kepedulian yang kukuh, tak terubahkan dalam diri Ahok, baik dalam level bertutur kata maupun bertindaknya. “*Percuma menjadi sarjana tetapi berkarakter tidak peduli dengan penderitaan rakyat banyak*”<sup>63</sup>, kata Ahok meniru pesan ayahnya. Pesan ayah menggerakkan sekaligus memengaruhi seluruh solidaritas Ahok kepada kepentingan banyak orang. Maka bagi Ahok, “*menjadi pejabat itu untuk melawan*

---

<sup>63</sup>Jani Ginting & Yasnovita. 2008. *Merubah Indonesia: The Story of Basuki Tjahaja Purnama*. Jakarta: Center for Democracy and Transparency, hlm., 13

pejabat yang menyengsarakan rakyat”.<sup>64</sup>

Atau, pesan lain ayahnya, meminjam pepatah Tiongkok, menginspirasi Ahok:

*“Orang miskin jangan melawan orang kaya. Orang kaya jangan menentang pejabat”. Untuk menantang walikota terpaksa harus menjadi walikota agar mampu membela hak pedagang pasar tradisional.*<sup>65</sup>

Pilihan untuk selalu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak pulalah yang mendorong Ahok berkeputusan untuk berpartisipasi terjun dalam pertarungan politik. Ahok bertarung, dalam dan atas nama rakyat banyak. *“Makanya jujur saja, saya jadi politikus di tengah kemarahan. Kemarahan melihat oknum pejabat yang korupsi, tetapi santun luar biasa, tetapi rakyat begitu miskin. Makanya saya marah. Itu kemuakan hati saya aja. Enggak bisa nahan ya keluar”, kata Ahok.*<sup>66</sup>

Tidak mengherankan kalau sampai sekarang, dalam setiap tindakan dan komunikasi politiknya Ahok selalu berbicara tentang rakyat banyak, termasuk kemarahannya, yang kerap kali menggunakan diksi yang kasar, terkesan tidak memedulikan etika, juga semuanya selalu atas nama rakyat, memperjuangkan kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan mereka.

“Kalau orang merasa tersinggung, atau merasa tidak suka sama perkataan saya, ya saya minta maaf. Tetapi kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu miskin, sementara oknum pejabat nyolong uang gila-gilaan dengan santun, gaya bahasa agamis, kamu muak enggak? Nah, itu ungkapan perasaan saya yang sudah enggak tahan”, kata Ahok”, tambah Ahok.<sup>67</sup>

Keberpihakan karena pengalaman otentik dengan kondisi sosial masyarakat banyak menempatkan Ahok sebagai seorang pemimpin otentik pula. Pemimpin otentik ditandai oleh “bersikap” dan “bertindak” apa adanya, dan sukar berubah<sup>68</sup>, apalagi menyangkut kepentingan yang melibatkan banyak orang.

Ahok berpolitik untuk rakyat Jakarta. Berbagai cara bertindak dan bertutur kata Ahok berjalan seiring dengan kebutuhan riil rakyat Jakarta, dan Ahok menjadi representasi, sekaligus jawaban atas kebutuhan masyarakat Jakarta akan sebuah perubahan. Perubahan itu digambarkan sebagai kemudahan warga mengakses berbagai fasilitas publik yang selama ini tidak terakses secara merata, bahkan tidak terakses sama sekali karena disumbat oleh sistem birokrasi yang tidak bekerja secara lincah dan fleksibel.

Dalam hal ini benarlah kiranya, kalau Ahok menggambarkan

<sup>64</sup>Ibid., hlm., 18.

<sup>65</sup>Ibid., hlm., 17

<sup>66</sup>CNN Indonesia, Jumat, 20 Maret 2015

<sup>67</sup>Ibid.

<sup>68</sup>Budiarto Shambazy, Musim Politik Basuki, dalam *Kompas*, Sabtu, 30 April 2016, hlm. 2.

tindakannya memecat-mecat PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta sebagai cerminan dari kemarahan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Ahok menggambarkan kemarahannya sebagai representasi kemarahan rakyat karena mekanisme dan sistem kerja birokrasi belum menempatkan kekayaan sebagai pelayanan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. *“Jadi, orang enggak bisa urus surat, mau maki-maki, tetapi enggak bisa. Itu diwakili oleh saya”*, kata Ahok.<sup>69</sup>

Inspirasi etika utilitarianisme tindakan *“bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”*, mendapat pembenaran dan sekaligus pengesahannya di sini, di dalam komunikasi dan tindakan politik Ahok.

### **Ahok dan Utilitarianisme Peraturan**

Kalau etika utilitarianisme tindakan memiliki prinsip, *“bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”*, maka etika utilitarianisme peraturan berprinsip, *“bertindaklah menurut kaidah/peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”*.

Prinsip ini mau menegaskan bahwa sebuah tindakan bernilai etis, tidak saja ditentukan oleh manfaat

atau kegunaan untuk sebanyak mungkin orang pada saat tindakan itu dilakukan, tetapi lebih jauh dari itu, manfaat atau kegunaan sebuah tindakan untuk sebanyak mungkin orang hanya bernilai etis kalau pelaksanaan tindakan tersebut sesuai dengan kaidah/peraturan yang berlaku.

Atau, nilai etis sebuah tindakan untuk kesejahteraan banyak orang, pada pelaksanaannya harus mengikuti irama aturan, tidak saja karena aturan itu berlaku dalam masyarakat, tetapi juga karena aturan tersebut diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat bersangkutan. Peraturan, norma, hukum, undang-undang adalah piranti etis yang mendasari sebuah tindakan atau tutur kata seseorang bernilai baik atau buruk secara etis. Sepanjang pelaksanaan sebuah tindakan dan cara berkomunikasi bergerak dalam koridor aturan, undang-undang, serta norma bersama yang mengikat, juga disepakati bersama, sepanjang itu pula tindakan tersebut dinilai benar.

Bagaimana menafsir Ahok dalam konteks ini? Dalam setiap tindakan politik aturan, norma, undang-undang, dan konstitusi adalah kerangka, acuan, dan panduan, sebuah tindakan bernilai benar atau tidak. Logikanya, kalau sebuah tindakan yang pada pelaksanaannya mengikuti kerangka, acuan, dan panduan yang disepakati dalam sebuah konstitusi maka tindakan itu disebut benar. Sebaliknya yang salah, yaitu kalau sebuah tindakan yang pelaksanaannya berlawanan dengan

---

<sup>69</sup>Kompas.com, Rabu, 18 Mei 2016.

kerangka, acuan, dan norma undang-undang, maka tindakan itu tidak benar (salah).

Konstitusi adalah panglima sebuah tindakan politik. Sekeras apapun kontroversi sebuah tindakan politik, selama bergerak dalam kerangka sebuah undang-undang yang disepakati, selama itu pula dia menjadi benar. Tindakan politik Ahok, baik dari sisi komunikasi maupun pelaksanaan kebijakannya dipenuhi serba ragam kontroversi dan silang pendapat. Kehidupan bernegara, seperti Indonesia yang multikultur, dalam pandangan Ahok, konstitusi menjadi lebih penting daripada kitab-kitab suci. Hanya konstitusi yang mampu menyatukan perbedaan tafsir atas isi kitab suci yang berbeda-beda dalam setiap agama. *“Kitab suci merupakan sesuatu yang sangat penting, namun dalam kehidupan bernegara, konstitusi harus tetap dikedepankan ketimbang kitab suci,”* kata Ahok.<sup>70</sup>

Keteguhan Ahok pada amanat konstitusi itu pulalah yang mendorong dia melakukan gebrakan dan berbagai tindakan politik, disukai atau tidak disukai, yang terpenting baginya, tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menegakkan kewibawaan konstitusi, tidak saja di hadapan para pembuat konstitusi, tetapi juga di hadapan rakyatnya. Konstitusi dibuat untuk memastikan kepentingan banyak orang terpenuhi dengan baik dalam aturan yang benar. Hanya dalam kepastian itulah kesejahteraan sebanyak mungkin rakyat dapat

terpenuhi. Pilihan Ahok untuk berpijak dan patuh kepada tuntutan konstitusi, merelakan dirinya untuk ditinggalkan para pemilih (konstituen).

Kepada para wartawan Ahok pernah bertanya tentang perbedaan antara negarawan dan politisi. Bagi Ahok, jawaban atas pertanyaan itu sangat sederhana. *“...kita disumpah taat pada konstitusi. Seorang negarawan harusnya taat pada konstitusi bukan konstituen dengan segala risiko. Bahasa kerennya, kamu sembelih kepala saya pun, saya tetap berdiri untuk konstitusi. Inilah negarawan,”* kata Ahok.<sup>71</sup>

Apa dasar hukum Ahok melakukan gebrakan politik yang di luar kebiasaan pemimpin pada umumnya? Setiap tindakan politik Ahok terukur dalam artian berdasarkan standar norma aturan yang berlaku. Sebagai sampel, dan untuk membuktikan bahwa tindakan politik Ahok benar kemanfaatannya untuk kepentingan sebanyak mungkin orang dan bertolak dari amanat konstitusi, kita akan memeriksa beberapa tindakan politik yang dicanangkannya sebagai kebijakan.

Kebijakan pembatasan lokasi unjuk rasa, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 228 Tahun 2015, misalnya, Ahok bereferensi pada Undang-undang No. 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagai induknya. *“Waktu itu lagi semangat-semangatnya reformasi dan kelaur peraturan itu,*

<sup>70</sup>Tribunnews.com, Minggu, 22 September 2013.

<sup>71</sup>Ibid.

*bahkan diatur tidak boleh berisik (berdemo) di depan rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, tempat umum, tempat penting. Itu semua ada aturannya. Hari besar pun tidak boleh unjuk rasa,”*<sup>72</sup> kata Ahok mengenang.

Menurut Ahok banyak orang melupakan Undang-undang tersebut, termasuk para aktivis yang berdemo. Atas dasar itu maka Pergub dilahirkan bahwa hanya di tiga lokasi boleh berdemonstrasi: alun-alun DPR; Silang Selatan Monas, dan Parkir Timur Senayan. Bagi Ahok, hak menyatakan pendapat memang konstitusional, sama konstitusionalnya dengan hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, tetapi tidak boleh merugikan/mengganggu hak orang lain. Kedua hak tersebut berdiri di atas aturan Undang-undang yang sama. *“Semua orang berhak menyampaikan pendapat, itu betul, tapi apakah berhak merugikan orang banyak lainnya?”*, tanya Ahok<sup>73</sup> retoris.

Hal yang sama, ketika Ahok melakukan penggusuran beberapa kawasan di Jakarta (Kampung Pulo, Kali Jodo, Pasar Ikan, dan lain-lain). Dia melakukan tindakan penggusuran untuk mengembalikan fungsi lahan, antara lain: normalisasi kali untuk mengatasi banjir; ruang terbuka hijau; dan mengembalikan tanah negara di bantaran-bantaran kali yang diokupasi bertahun-tahun sehingga warga menganggap sebagai hak mereka yang harus dipertahankan. Semua tindakan

dilakukan berpijak atas dasar manfaat untuk orang banyak. Dan, manfaat untuk sebanyak mungkin orang hanya bisa ditegakkan di atas fondasi konstitusi, aturan, norma, dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengatakan “mengembalikan fungsi lahan”, tersirat adanya praktek penyelewengan atas fungsi lahan dalam sejarah, dari resmi menjadi illegal. Tindakan illegal tidak dibenarkan secara etis apalagi kalau sampai mengganggu kepentingan banyak orang. *“Dahulu sungai lebarnya 20-50 meter, sekarang tinggal 3 sampai 5 meter. Apakah 5 meter itu dari zaman dahulu? Enggak mungkin. Itu jelas lahan urukan”*<sup>74</sup>, kata Ahok tentang kali Ciliwung yang dinormalisasi.

Begitu juga ketika Kali Jodo digusur. Prostitusi bukan alasan utama penggusuran tetapi adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Pokok Agraria, yaitu warga menguasai tanah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi.<sup>75</sup> Ahok memiliki cara berpikir sebaliknya, yaitu mau mengembalikan tanah negara untuk kepentingan bersama. Tampak jelas, Ahok tidak pernah sedikit pun mau mundur dari keputusannya kalau keputusan tersebut benar secara konstitusional dan mendatangkan kebermanfaatan bagi rakyat banyak.

Dengan demikian, arkeologi-genealogis etika utilitarianisme peraturan mendapatkan penegasan di

<sup>72</sup>Kompas.com, Sabtu, 31 Oktober 2015.

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup>Sindonews.com, Selasa, 25 Agustus 2015.

<sup>75</sup>Liputan6.com., tanggal 17 Februari 2016.

sini, yaitu, bahwa: “bertindaklah menurut kaidah/peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”. Ahok selalu berpijak pada fundamen etika ini.

### **Utilitarianisme Ahok: Jawaban atas Kebutuhan Mencapai Kebahagiaan Sebanyak Mungkin Orang?**

Kita sulit mendefinisikan terminologi “sebanyak mungkin orang” sama sulitnya kita mendefinisikan “kebahagiaan sebanyak mungkin orang”. Namun, karena penelitian ini bersifat interpretatif subyektif, maka kerja tafsir amat dibutuhkan. Pertanyaan tentang apa yang mau ditafsir adalah kesulitan lainnya. Hasil penelitian, hasil survei, dan testimoni warga adalah obyek tafsiran untuk memprediksikan kebermanfaatan komunikasi dan tindakan politik Ahok bagi sebanyak mungkin orang di DKI Jakarta. Danny Prasetyo pernah melakukan sebuah penelitian kuantitatif tentang “Persepsi Masyarakat DKI Jakarta terhadap Figur dan Komunikasi Politik Ahok”<sup>76</sup>, hasilnya bahwa 57, 25 % dari 400 responden warga yang berasal dari lima wilayah setuju dengan gaya komunikasi Ahok. Masyarakat dari berbagai latar belakang (pendidikan dan profesi) yang sudah tinggal di Jakarta selama lebih dari 10 tahun, menggambarkan

Ahok sebagai seorang pemimpin yang tegas yang setiap perilaku politiknya didasarkan pada ketaatan penuh pada norma dan aturan yang berlaku.<sup>77</sup>

Pada tanggal 1 – 7 Juni 2015, *Periskop Data* melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok. Dari 500 responden yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta (menggunakan teknik wawancara terbuka), 48,2 % menyatakan kepuasannya terutama untuk bidang: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.<sup>78</sup>

Lima bulan sesudahnya (1–7 Desember 2015), *Populi Center* melakukan survei yang sama terhadap 400 responden warga Jakarta. Mereka menyatakan kepuasan terhadap kinerja Ahok sebagai Gubernur. Di tengah sorotan mengenai gaya komunikasi “kobo” dan gebrakan politik yang dianggap kontroversial, 58, 2 % warga Jakarta menyatakan kepuasannya, bahkan 39,8 % masyarakat mengatakan bahwa pembangunan Jakarta maju pesat di masa kepemimpinan Ahok.<sup>79</sup>

Di Tahun 2016 sejumlah lembaga survei kembali melakukan upaya pengukuran terhadap kinerja kepemimpinan Ahok. *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* merilis hasil survei yang dilakukan dari tanggal 5 – 10 Januari 2016, terhadap 400 responden warga Jakarta. Warga Jakarta sangat menyukai kepemimpinan Ahok,

<sup>76</sup>Danny Prasetyo. “Persepsi Masyarakat DKI Jakarta terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)”, dalam *POLITIKA*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014.

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Periskopdata.com, tanggal 16 Juni 2016.

<sup>79</sup>Liputan6.com., tanggal 13 Desember 2015.

terutama kepribadian personal dan prestasi/kinerjanya. Sebanyak 42,50 % responden sangat menyukai kepribadian Ahok dan 29, 25 % menyukai hasil kerja atau prestasinya. Sebanyak 62,75 % warga melihat adanya perubahan Jakarta di masa Ahok. Publik Jakarta menyukai, tidak saja perilaku dan sikap, tetapi juga tindakan politik Ahok.<sup>80</sup>

*Populi Center* termasuk lembaga yang paling rutin melakukan survei. Lembaga ini mencatat adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Ahok. Kepuasan 70 % di bulan Februari 2016 meningkat menjadi 73,3 % di bulan April 2016 dengan sampel responden 400 orang dari enam wilayah DKI Jakarta<sup>81</sup> (Utara, Selatan, Pusat, Timur, Barat, Kepulauan Seribu). Peningkatan kepuasan hanya dalam dua bulan.

Sementara *Charta Politica* melakukan survei tanggal 15 – 20 Maret 2016. Hasilnya tercatat 82, 8 % masyarakat (publik) Jakarta puas terhadap kinerja Ahok bersama wakil Djarot Saiful Hidayat. Survei yang melibatkan 400 orang responden ini pun memberi apresiasi yang tinggi terhadap tiga bidang sebagai program unggulan: pelayanan kantor kelurahan, Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan pelayanan Puskesmas/Rumah Sakit.<sup>82</sup>

Dan, yang terbaru survei yang dilakukan *Cyrus Network* pada bulan April 2016. Survei yang melibatkan

respon terbanyak, yaitu: 1000 orang yang tersebar di seluruh kelurahan di Jakarta. Survei ini menghasilkan kesimpulan bahwa Jakarta di masa pemerintahan Ahok mengalami perubahan yang lebih baik. Sebanyak 76,2 %<sup>83</sup> warga Jakarta mengakui, dan Ahoklah membuat perubahan tersebut. Sebanyak 60 % warga mengakui puas terhadap kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur.<sup>84</sup> Hasil survei menunjukkan bahwa Ahok mampu membalikan keyakinan dan kepuasan warga Jakarta dalam masa kepemimpinannya.

Perubahan yang dibawa oleh Gubernur Ahok dirasakan manfaatnya oleh banyak warga Jakarta. Umi, seorang ibu rumah tangga dari Kampung Pulo mengatakan bahwa tahun ini (2016) luapan Kali Ciliwung tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya. Penurunan volume banjir secara drastis karena adanya proyek normalisasi Kali Ciliwung.<sup>85</sup> Atau, Haji Machrus dari Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, memberikan kesaksian tentang perubahan yang dialaminya dan warga lainnya. “*Selama Pak Ahok jadi Gubernur, masyarakat Kepulauan Seribu mendapat perhatian dari Pemprov. Banyak perubahan penting dirasakan masyarakat, seperti: Puskesmas yang bagus; mendapat rujukan ke Jakarta; adanya Kapal Puskesmas Keliling; pantai bersih; naik busway*

---

<sup>80</sup>Kompas.com, Senin, 25 Januari 2016.

<sup>81</sup>Liputan6.com., tanggal 25 April 2016.

<sup>82</sup>Mediaindonesianews.com, Rabu, 30 Maret 2016.

---

<sup>83</sup>Liputan6.com., tanggal 14 Mei 2016.

<sup>84</sup>Mediaindonesia.com, Jumat, 13 Mei 2016.

<sup>85</sup>Kompas.com, Rabu, 03 Februari 2016.

*gratis; masuk Ancol gratis, cukup tunjuk KTP saja*”, kata Machrus.<sup>86</sup>

Pencapaian Ahok dalam memimpin Jakarta tidak saja memberi kepuasan dan diakui rakyatnya sendiri, tetapi juga secara institusional diakui oleh berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional. Sekadar contoh, Majalah *Globe Asia* pernah menobatkan Ahok sebagai Gubernur terbaik se-Asia 2015. Bahkan, pada cover depan majalah tersebut *Globe Asia* menulis: “*Basuki Tjahaja Purnama has redefined the country’s political landscape and now working to transform Jakarta*”.<sup>87</sup>

Atau, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), secara mengejutkan, pada tanggal 11 Mei 2016 mengganjari empat penghargaan sekaligus kepada Pemprov DKI Jakarta, yaitu: (1) Propinsi dengan Perencanaan Terbaik; (2) Provinsi dengan Perencanaan Inovatif; (3) Provinsi dengan Perencanaan Progresif; dan (4) *Milenium Development Goals* (MDGs) 2016.<sup>88</sup>

Utilitarianisme Ahok dengan, misalnya: meng-*upload* video rapat, agresif, suka marah-marah, berbicara kasar, dan terkesan tidak mau tahu orang lain, ternyata memiliki alasan fundamental, yakni: dia tidak ingin bermain-main dengan rakyat, menekan korupsi yang mengakar kuat di birokrasi pemerintahan, membelanjakan uang negara sesuai kebutuhan, berhemat, menolak berbagai korupsi (manipulasi

anggaran, *mark-up* anggaran untuk dialirkan ke kantong pribadi), dan ketegasan menolak kepentingan memperkaya diri pribadi dan golongan.

Di sinilah terjadi afirmasi etis, di satu pihak, tindakan etika melalui prinsip dasariah “*Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*” hanya bernilai benar secara etis kalau tindakan tersebut diikuti oleh prinsip dasariah yang lain, yaitu: *bertindaklah menurut kaidah/peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*”. Itulah utilitarianisme yang sesungguhnya, yaitu kebermanfaatannya sebuah tindakan mendapatkan pengujiannya ketika pelaksanaannya dilakukan dalam kerangka aturan dan norma yang benar.

Dalam alur itulah kita mendudukan Ahok dengan segala gaya komunikasi dan tindakan politik yang dimobilnya. Kepentingan, kebaikan, dan bahkan kebahagiaan sebanyak mungkin warga Jakarta menopang semua cara bertutur kata dan bertindak yang terkesan sangat arogan dan tidak mau tahu tersebut.

## SIMPULAN

Utilitarianisme menuntut agar orang selalu mengusahakan terciptanya kebahagiaan sebesar-besarnya untuk

<sup>86</sup>Suara.com, Senin, 28 Maret 2016.

<sup>87</sup>Globe Asia, Volume 9 Number 1/January 2015.

<sup>88</sup>Kompas.com., Rabu, 11 Mei 2016.

sebanyak mungkin orang.<sup>89</sup> Ahok terlahir dalam sebuah konteks sejarah keberpihakan yang otentik. Ketika setiap rejim kekuasaan lebih banyak menjanjikan perubahan atas perikehidupan masyarakat banyak Ahok justeru membuktikannya bahwa perubahan demi kebermanfaatan untuk masyarakat bisa dilakukan sekarang.

Model komunikasi dan tindakan politik yang *Low Context* merupakan antitesa dari kemakuan Ahok kepada sistem sosial masyarakat kita yang seolah-olah permisif terhadap perilaku politik elite yang “gemar” memanipulasi rakyat banyak dalam proses perencanaan pembuatan undang-undang (aturan) dan pembuatan undang-undang, tetapi justeru pada tingkat implementasi undang-undang tersebut banyak kali mencederai dan bahkan jauh dari mengakomodasikan kepentingan rakyat banyak.

Ahok melawan kemunafikan politisi negeri ini yang sengaja bersembunyi di balik undang-undang yang dibuatnya, yang, katanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kenyataannya, aturan perundangan yang dirancang justeru memberi ruang bagi proses memperkaya diri dan kelompok melalui perilaku hidup korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Idealisme undang-undang Negara yang dibuat dan yang pelaksanaan seharusnya untuk mewisuda terbangunnya sebuah sistem yang mensejahterakan rakyat banyak, justeru sebaliknya

dibuat rancu ketika melalui undang-undang yang sama para politisi sengaja menjauhkan undang-undang tersebut dari idealisme mensejahterakan rakyat banyak.

Di sini Ahok tampil melawan sistem kepura-puraan “atas nama rakyat” untuk menjadi pembela kepentingan rakyat yang sesungguhnya. “...*Tetapi kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu miskin, sementara oknum pejabat nyolong uang gila-gilaan dengan santun, gaya bahasa agamis, kamu muak enggak? Nah, itu ungkapan perasaan saya yang sudah enggak tahan*”,<sup>90</sup> kata Ahok”

Atas nama pemberontakannya melawan kemunafikan itulah yang membuat Ahok menampilkan diri apa adanya, bertutur kata apa adanya (jujur), terkesan tidak menghiraukan norma berkomunikasi, bertindak kasar (melampaui standar dialog interpersonal yang dibutuhkan rakyat), dan arogan (sehingga terkesan tidak mau mendengar orang lain). Di balik semuanya, harus diakui, kepentingan rakyat banyak menjadi pertimbangan utama.

Gaya komunikasi dan tindakan politik yang tidak lazim Ahok sudah mulai dirasakan kebermanfaatannya. Survei dan *polling* pendapat mengenai kepuasan masyarakat banyak di Jakarta sudah cukup untuk menggambarkan kegunaan dan kebermanfaatan gaya komunikasi dan tindakan politik “kobo” ala Ahok tersebut.

---

<sup>89</sup>Franz Magnis-Suseno (cetakan 3). 2015. *Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 111.

---

<sup>90</sup>CNN Indonesia, Jumat, 20 Maret 2015.

Ahok sedang membangun sebuah sistem dan gaya politik dengan cara yang berbeda, komunikasi dan tindakan politik yang langsung, *to the point*, sambil tetap berpegang teguh pada amanat undang-undang. Ahok sedang mengajarkan agar bertindak politik apapun gayanya tetap harus mengarah kepada ikhtiar menjaga kewibawaan konstitusi, undang-undang dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi harus dijaga dengan sikap konsisten sehingga pelaksanaannya membawa kegunaan dan kebermanfaatannya untuk sebanyak mungkin rakyat. Seorang pemimpin diberi mandat untuk memastikan konsistensi tersebut bahwa kesejahteraan rakyat banyak harus terpenuhi dalam dan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara benar.

Afirmasi etis utilitarianisme juga menjadi benar di sini bahwa, “*bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*” akan dinilai konsisten secara etis kalau tindakan tersebut menyertakan prinsip lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu: *bertindaklah menurut kaidah/peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan/kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang*”.

Terlepas dari sisi kebermanfaatannya komunikasi dan tindakan politik Ahok dalam memimpin Jakarta seperti dihasilkan

oleh studi ini, peneliti memiliki kewajiban untuk menyampaikan dua saran berikut: *Pertama*, gaya komunikasi dan tindakan politik terjadi dalam konteks budaya tertentu. Jakarta adalah sebuah kota dengan akumulasi konteks pluralitas budaya yang mau tidak mau, suka tidak suka, orang dituntut untuk memperhitungkan keberlainan konteks budaya orang lain dalam berkomunikasi. Sebagai Gubernur yang mengatasi keberlainan konteks budaya di Jakarta Ahok disarankan untuk tidak menggunakan diksi tunggal berbahasa dalam konteks budayanya Ahok dalam berkomunikasi (*Low Context Communication*). *High Context Communication*, yang menekankan harmoni, implisit, dan anti konfrontasi perlu diadaptasi Ahok dalam berkomunikasi. “... *mungkin kalau di sini (Jakarta) agak kaget dengan sikap Ahok seperti ini, tetapi kalau di Sumatera ya, mungkin sikap Ahok itu ya dianggap biasa saja*”,<sup>91</sup> kata Ray Rangkuti. Tafsir diksi berbahasa adalah tafsir budaya. Ahok perlu mempertimbangkan pluralitas tafsir diksi bahasa tersebut.

*Kedua*, gaya berkomunikasi dan bertindak Ahok yang tegas mempunyai maksud yang baik dan benar, terutama untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik, korupsi, kolusi, dan nepotisme dibabat habis. Tetapi untuk mengubah Jakarta dan masyarakatnya tidak harus dengan cara yang terkesan kasar, blak-blakan, bernada suara tinggi, dan arogan. Disadari atau tidak disadari

<sup>91</sup>Aktual.com, tanggal 18 Oktober 2014, Jam 5.36.

cara berkomunikasi dan bertindak Ahok seolah-olah mau menghabiskan hak warga Jakarta untuk merasa nyaman. Sebagai Gubernur, Ahok memiliki kewajiban untuk memastikan dimilikinya rasa nyaman tersebut dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan politik untuk kesejahteraan banyak warga di DKI Jakarta. Sebagai pemimpin Ahok memiliki kewajiban mengayomi semua warga lewat berbagai kebijakan komunikasi dan politiknya yang menyapa dan bersahabat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aras, Muhammad, Dr. 2014. *Komunikasi Politik: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Binus Media & Publishing.
- Bagi, Felix. 2012. "Narasi Diri, Yang Lain dan Institusi Yang Adil (Hermeneutika Diri dan Etika Politik Paul Ricoeur)", dalam Jurnal, *Wacana Iman dan Kebudayaan*. Maumere: Ledalero.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bertens, K. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Bua, Piter Randan. 2014. *The Ahok Way: Hidup adalah Kebenaran, Mati adalah Keuntungan*. Jakarta: Inspiro.
- Ginting, Jani & Yasnovita. 2008. *Merubah Indonesia: The Story of Basuki Tjahaja Purnama*. Jakarta: Center for Democracy and Transparency.
- Hoed, Benny H. 2014. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu
- Jayakarta, Ki Ageng. 2012. *Duet Wong Ndeso Memimpin Jakarta*. Yogyakarta: Manasuka.
- Liliwari, Alo, Prof. Dr., M.S. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, Deddy, Prof. MA., Ph.D. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi. Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Rosda Karya.
- Prasetyo, Danny. 2014. "Persepsi Masyarakat DKI Jakarta terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)", dalam *POLITIKA*, Vol. 5, No. 2.
- Rachels, James (terjemahan). 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ricoeu, Paul. 2014. *Teori Interpretasi, Membelah Makna dalam Anatomi Teks*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Santosa, Agus. 2015. *Hargaku Adalah Nyawaku, Basuki Tjahaja Purnama, Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Sayuti, Solatun Dulah Sayuti, Dr. Drs., M.Si. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Rosdakarya.
- Suseno, Franz Magnis. (cetakan 3). 2015. *Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Kanisius

- , 2015. 13  
*Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani sampai Abad-19*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2004. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surat Kabar, Majalah, Media Online, Internet:**
- Aktual.com*. 2014 (18 Oktober ).
- Badiyo. 2015. “Gaya Komunikasi Ahok”, dalam *Kompasiana.com*. (06 Maret 2015). *CNN Indonesia*. 2015 (Senin, 01 Juni).
- CNN Indonesia*. 2015 (08 Januari ).
- CNN Indonesia*. 2015 (Jumat, 20 Maret).
- CNN Indonesia*. 2015 (04 Juni ).
- Globe Asia*. 2015 (Volume 9 Number 1/January).
- Inilah.com*. 2016 (15 Mei ).
- Kompas.com*. 2014 (29 November).
- Kompas.com*. 2015 (Minggu,15 Maret).
- Kompas.com*. 2015 (20 Agustus).
- Kompas.com*. 2015 (Sabtu, 31 Oktober ).
- Kompas.com*. 2015 (05 November).
- Kompas.com*. 2016 (Senin, 25 Januari ).
- Kompas.com*. 2016 (Rabu, 03 Februari).
- Kompas.com*. 2016 (Rabu, 11 Mei).
- Kompas.com*. 2016 (18 Mei).
- Kompasiana.com*. 2013 (27 Agustus).
- Liputan6.com*. 2015 (13 Desember ).
- Liputan6.com*. 2016 (17 Februari).
- Liputan6.com*. 2016 (25 April ).
- Liputan6.com*. 2016 (14 Mei).
- Mediaindonesianews.com*. 2016 (Rabu, 30 Maret).
- Mediaindonesianews.com*. 2016 (Jumat, 13 Mei).
- Metrotvnews.com*. 2015 (26 Februari).
- Metrotvnews.com*. 2015 (07 Agustus).
- Okezone.com*. 2015 (19 Maret 2015).
- Periskopdata.com*. 2016 (16 Juni 2016).
- Republika.co.id*. 2015 (08 Maret).
- Shambazy, Budiarto. 2016. “Musim Politik Basuki”, dalam *Kompas*, (Sabtu, 30 April).
- Sindonews.com*. 2015 (27 Maret).
- Sindonews.com*. 2015 (25 Agustus).
- Suara.com*. 2015 (10 September).
- Suara.com*. 2016 ( Senin, 28 Maret).
- Tribunnews.com*. 2013 (Minggu, 22 September ).
- Tribunnews.com*. 2015 (18 Maret ).
- Tribunnews.com*. 2016 (06 Oktober ).
- Viva.co.id*. 2015 (18 Maret).
- www.psychologymania.com*. 2013. pengertian-komunikasi-politik-menurut.html.